

Kejagung: Lin Che Wei Terima Upah Miliaran Rupiah Per Bulan sebagai Konsultan

JAKARTA (IM) – Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia menduga, tersangka Lin Che Wei menerima miliaran rupiah sebagai upah bulanan sebagai konsultan terkait pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya, termasuk minyak goreng.

Lin Che Wei merupakan pihak swasta yang menjadi penghubung dan aktif dalam pengambilan kebijakan dan penerbitan ekspor beberapa perusahaan. “Saya tidak hafal besarnya, tetapi itu setiap bulannya, miliaran ada (upah yang diterima),” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidus) Kejagung RI Supardi kepada wartawan,

Jumat (20/5).

Supardi mengatakan, kehadiran Lin Che Wei selaku konsultan yang ikut serta mengambil kebijakan ekspor CPO mengarah ke konflik kepentingan. Bahkan, dia juga memberikan rekomendasi kepada Dirjen Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana agar menerbitkan izin ekspor. Apalagi, Lin Che Wei tidak memiliki jabatan dan kewenangan khusus di Kemendag.

“Bahkan memberikan rekomendasi untuk perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengannya. Itu saya katakan, sebelumnya sudah ada conflict interest. Esensinya di situ,” katanya. ● han

KPK Tahan Eks Dirjen Hortikultura Kementan Hasanuddin Ibrahim

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan eks Direktur Jenderal (Dirjen) Hortikultura Kementerian Pertanian (Kementan) Hasanuddin Ibrahim, Jumat (20/5).

Hasanuddin Ibrahim sudah ditetapkan sebagai tersangka pada 2016 lalu di kasus pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Ditjen Hortikultura Kementerian Tahun Anggaran 2013.

“Dilakukan upaya paksa penahanan tim penyidik terhadap HI (Hasanuddin Ibrahim),” ujar Deputy Penindakan KPK Karyoto dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Jumat (20/5).

Hasanuddin Ibrahim ditahan di rumah tahanan (Rutan) Gedung Merah Putih KPK. Karyoto menjelaskan, Hasanuddin Ibrahim diduga terlibat dalam korupsi pengadaan pupuk hayati di Kementan pada 2013 lalu.

“Perkara pengadaan pu-

puk hayati di Kementan pada tahun 2013,” ucapnya.

Sebelumnya, pada 2016 lalu, KPK menjerat Hasanuddin dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan fasilitas sarana budidaya mendukung pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di Ditjen Hortikultura Kementerian Tahun Anggaran 2013.

Dalam kasus ini, Hasanuddin diduga melakukan pengelembungan harga yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Hasanuddin diduga tidak bermain sendiri dalam kasus ini. KPK juga menetapkan Eko Mardiyanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Ditjen Hortikultura Kementan dan Sutrisno dari pihak swasta, sebagai tersangka.

KPK menaksir nilai kontrak pengadaannya sekitar Rp 18 miliar dan korupsi yang dilakukan ketiganya menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 10 miliar. ● han

2 | Polhukam



IDN/ANTARA

BEA CUKAI BANDARA SOETTA BANTAH ADA MAFIA IMPOR

Kepala Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta Finari Manan memberikan keterangan pers terkait adanya isu mafia impor di kantor Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (20/5). Finari Manan membantah adanya mafia impor di Bea Cukai Bandara Soekarno Hatta terkait terungkapnya pungutan liar yang dilakukan oknum pejabat Bea Cukai Bandara Soetta terhadap salah satu perusahaan jasa titipan (PJT).

Jokowi akan Berikan Perlindungan Bagi Tenaga Kerja Formal dan Informal

Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, dan Setkab, saat ini terus mendorong percepatan kepesertaan Jamsostek, untuk pekerja formal maupun informal.

JAKARTA (IM) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Abraham Wirotomo mengatakan, adanya instruksi langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait optimalisasi Jaminan Ketenagakerjaan, diharapkan dapat meng-

hindarkan ahli waris atau keluarga dari para pekerja hidup miskin bila terjadi sesuatu misalnya kecelakaan kerja.

Abraham menjelaskan, untuk menghindari keluarga pekerja atau ahli waris terjerumus kemiskinan ekstrem,

pemerintah melakukan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), yang diatur dalam Inpres No 2/ 2021.

“Presiden Joko Widodo konsisten memiliki komitmen kuat memberi perlindungan kepada buruh dan tenaga kerja baik formal maupun informal,” kata Abraham, usai menghadiri pembayaran klaim Jamsostek secara simbolik, di Bandung, Jawa Barat, Jumat (20/5).

Abraham mengungkapkan, pemerintah melalui Kantor Staf Presiden, Kemenko PMK, dan Setkab, saat ini terus mendorong percepatan

kepesertaan Jamsostek, untuk pekerja formal maupun informal. Ia menyebut, ditargetkan pada 2024, jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mencakup 74 persen untuk pekerja formal, dan 25 persen untuk pekerja informal.

“Untuk mencapai itu, Instruksi Presiden menugaskan Gubernur dan Bupati/Walikota agar mendorong seluruh pekerja di wilayahnya menjadi peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Barat sudah membayarkan klaim senilai Rp 2,4 Triliun.

Pembayaran tersebut dilakukan untuk 210.805 klaim, yang diajukan selama bulan Januari - April 2022.

Salah satu keluarga atau ahli waris penerima manfaat adalah Ida Farida. Berkat kepesertaan Jamsostek suaminya, yakni Kuswandiana sejak tahun 1992, Ida menerima pembayaran klaim senilai Rp 581 juta lebih. “Sangat bersyukur, akan digunakan untuk biaya kuliah anak dan memulai usaha sembako kecil-kecilan,” kata Ida, usai menerima pembayaran klaim secara simbolik dari BPJS Ketenagakerjaan Jawa Barat. ● mar



IDN/ANTARA

AKSI MAHASISWA PERINGATI HARKITNAS

Anggota Forum Mahasiswa Bogor melakukan orasi dan aksi teatral di depan kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/5). Aksi orasi, pembacaan puisi serta teatral tersebut dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang ke-114 tahun.

Golkar, PAN dan PPP Bangun Koalisi Pemilu 2024, Ini Kata PDIP

JAKARTA (IM) - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto angkat bicara soal terbentuknya koalisi Indonesia Bersatu (KIB) yang dibangun oleh Partai Golkar, PAN, dan PPP. Ia mengingatkan, agar tak memulai kontestasi lebih awal di tengah jalannya pemerintahan saat ini.

Hasto mengatakan, partainya menyadari bahwa jejang Pilpres 2024 ini, sudah banyak partai politik yang mulai memanas mesinnya. Bahkan, tak sedikit dari pimpinan parpol sudah melakukan pertemuan hingga membentuk koalisi bersama. Akan tetapi, dia mengingatkan agar

saat ini yang terpenting adalah kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

“(Jadi) jangan membawa kontestasi terlalu awal, yang kemudian membuang energi kita bagi perbaikan dan kemajuan bangsa dan negara pasca pandemi. Inilah yang kita dorong,” kata Hasto di lapangan Banteng, Jakarta, Jumat (20/5).

Hasto melihat pertemuan antara ketua umum partai Golkar, PAN dan PPP itu merupakan pertemuan silaturahmi. Dia menilai pertemuan itu belum bisa diartikan sebagai koalisi.

Menurutnya, koalisi dalam perspektif politik ditandai komitmen terhadap kerja sama berdasarkan pada platform politik, agenda-agenda pemerintahan, program-program untuk menjawab persoalan bangsa dan negara serta keterpaduan untuk menyatukan semua elemen kekuatan parpol dalam menghadapi pemilu khususnya pilpres.

“Sehingga pertemuan-pertemuan antara ketua parpol seperti yang dilakukan pak Airlangga, pak Zulhas, pak Suharso Monoarfa itu bagian dari tradisi demokrasi kita,” tandasnya. ● mei

Lahan Tambang, Gedung, hingga Aset Pelabuhan Milik Heru Hidayat Disita Terkait Kasus Jiwasraya

JAKARTA (IM) - Direktorat Upaya Hukum Eksekusi dan Eksaminasi (Uheksi) pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidus) menyita sejumlah aset milik terpidana Heru Hidayat terkait perkara tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwasraya. Aset-aset milik Heru Hidayat disita untuk memenuhi kewajibannya membayar uang pengganti sebesar Rp10 triliun.

Direktur Uheksi pada Jampidus Kejaksaan Agung (Kejagung), Sarjono Turin mengatakan, pihaknya bersama jajaran Kejaksaan Negeri (Kejan) menyita aset areal tambang, gedung perkantoran, jalan Hauling hingga kapal tongkang, yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur (Kalim). “Aset yang berhasil disita berupa areal pertambangan seluas 1.500 hektare, kemudian jalan hauling sepanjang 60 Km kurang lebih, kemudian areal perkantoran PT GBU,” kata Sarjono Turin dalam keterangan tertulis, Jumat (20/5).

Ia menjelaskan, tim jaksa Direktorat Uheksi menyita aset berupa Jetty yang merupakan pelabuhan khusus untuk pemuatan batubara ke tongkang, 3 mesin genset, serta lain-lain yang mempunyai nilai ekonomis.

Tak hanya itu, tim Jampidus Kejagung masih menelusuri seluruh aset di daerah milik terpidana bos PT GBU, Heru Hidayat, untuk pembayaran uang pengganti Rp10 triliun. “Kami telusuri di daerah semua. Kami sifatnya pengendalian

untuk wilayah dalam melaksanakan eksekusi uang pengganti para terpidana,” tuturnya.

Sementara untuk nilai aset yang berhasil dieksekusi, masih dilakukan penghitungan oleh tim penilai independen dan tim Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejagung.

“Nilainya lagi dalam penghitungan oleh tim dari Direktorat Uheksi dan Kejan Jakarta Pusat, PPA, serta tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP),” tuturnya.

Ia juga mendukung dan mengendalikan untuk Kejan menelusuri yang akan disita eksekusi atas perkara yang sudah inkrah atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami akan support, dan keliling ke seluruh daerah,” ucapnya. “Perkara yang sudah inkrah, kita akan coba tarik aset-aset terpidana itu, apapun bentuknya, seperti properti, alat-alat transportasi, deposito, ada sahamnya, dan lain-lain,” ujarnya.

Sebagai informasi, kasus megakorupsi ini telah ditaksir telah merugikan keuangan negara hingga Rp16,807 triliun. Adapun para terpidana dalam perkara ini ialah Presiden Komisaris PT Trade Alam Minera, Heru Hidayat.

Kemudian, terpidana Benny Tjokrosaputro yang divonis penjara seumur hidup usai hakim Mahkamah Agung (MA) menolak kasasi yang diajukan jaksa dan Benny.

Di skandal Jiwasraya, Heru

Hidayat dihukum seumur hidup bersama-sama dengan Benny Tjokrosaputro selaku Komisaris PT Hanson International Tbk. Vonis itu sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak kasasi yang diajukan mereka. Dengan penolakan kasasi ini, putusan Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menjadi berkekuatan hukum tetap, yakni keduanya juga dijatuhi vonis membayar uang pengganti sebesar Rp16 triliun lebih. Dengan rincian Benny Tjokro diwajibkan membayar uang pengganti Rp 6.078.500.000.000, sedangkan Heru Hidayat membayar pengganti Rp 10.728.783.375.000.

Putusan dengan nomor perkara 4/Pid.us-TPK/2021/PT/DKI diketok pada 24 Agustus 2021. Duduk sebagai ketua majelis hakim Suhadi dengan anggota Eddy Army dan Ansoeri.

Kemudian, Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirta divonis 20 tahun penjara. Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS Syahmirwan divonis 18 tahun penjara.

Selanjutnya ialah mantan Direktur Utama PT AJS Hendrisman Rahim dan mantan Direktur Keuangan PT AJS Hary Prasetyo yang telah dieksekusi ke Rutan Salemba. Hendrisman dan Hary akan menjalani pidana 20 tahun penjara. ● han

HUT KE-57 LEMHANNAS

Andi Widjajanto Paparkan Geopolitik 5.0

JAKARTA (IM) – Gubernur Lemhanas, Andi Widjajanto membawakan orasi ilmiah dengan judul “Geo V” sebagai rangkaian peringatan HUT ke-57 Lemhannas Republik Indonesia (RI), di ruang Dwiwarna Purwa pada 19 Mei 2022.

“Geopolitik 5.0 atau ‘Geo V’, dibaca five tapi juga dibaca V yang bermakna ‘victory’. Victory atau kemenangan untuk memastikan kemenangan kita menuju 2045,” kata Andi Widjajanto, dalam siaran pers.

Ia menyebutkan, proyeksi geopolitik ini diperlukan untuk memosisikan Indonesia sebagai kekuatan regional pada 2045.

“Narasi Geo V dirumuskan dengan satu tujuan yakni menegaskan lompatan strategis yang harus dilakukan Indonesia di lima ranah pertarungan, yaitu demokrasi, ekonomi hijau, ekonomi biru, transformasi digital, serta pembangunan Ibu Kota Nusantara,” tutur Andi.

Lompatan ini penting dilakukan agar kapasitas Indonesia untuk melakukan proyeksi geopolitik bisa meningkat tajam dari kapasitas yang ada saat ini menuju kapasitas Geo V yang menempatkan Indonesia menjadi kekuatan regional di tahun 2045.

Paparan orasi ini dikemas secara khusus dengan bentuk paparan menyajikan tayangan visual membahas geopolitik dunia dan nasional. Pemaparan dibagi dalam tiga babak, babak pertama memaparkan kajian pustaka geopolitik yakni hegemoni kekaisaran, pemikiran geopolitik Jerman

dan Amerika Serikat, pertarungan antara hegemoni dan universalistik, kepemilikan sumber daya, dan literatur geopolitik V. Pada bab 2 dibahas mengenai evolusi geopolitik nasional serta pada bab 3 dibahas mengenai proyeksi geopolitik 2045.

Sebelum memulai lompatan strategis menuju Geo V, Indonesia perlu melakukan napak tilas konseptual dan menelusuri ulang jejak sejarah. “Kita kembali ke 20 Mei 1965 yang ditetapkan sebagai titik nol Lemhannas. Di titik nol tersebut, Bung Karno menyampaikan gagasan strategis arah gerak Indonesia di tengah pertarungan keras ideologi antara Blok Barat melawan Blok Timur di era Perang Dingin,” kata Andi dalam paparannya.

Lemhannas dibentuk sebagai sekolah Geopolitik. Sekolah yang mempelajari interaksi antara geografi dan politik. Sekolah yang mengkaji bagaimana di lingkup geografis tertentu, terjadi pertarungan kekuatan politik keras. 57 tahun berlalu, Lemhannas terus berusaha menjalankan mandat Bung Karno untuk menempatkan Indonesia sebagai negara utama di Asia Tenggara, Asia Timur, Indo Pasifik, dan Dunia.

57 tahun berlalu, Lemhannas berupaya agar kajian-kajian geopolitik yang diserahkan ke Presiden tetap relevan untuk mengantisipasi kemunculan Perang Generasi V. Sekarang, Lemhannas harus melakukan transformasi institusional agar tetap relevan untuk menawarkan rekomendasi kebijakan tentang proyeksi Geopolitik 5.0. ● han

KPK Periksa Istri Tersangka Eks Dirjen Kemendagri Ardian Noervianto

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemerksaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Lisnawati Anisahak Chan. Lisnawati merupakan istri tersangka mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noervianto (MAN).

Sedanya, Lisnawati bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Dia bakal didalami keterangannya terkait kasus dugaan suap pengajuan pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Keterangan itu dibutuhkan sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan suaminya. “Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK atas nama Lisnawati Anisahak Chan ASN pada Kementerian Dalam Negeri,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui pesan singkatnya Jumat (20/5).

Diketahui sebelumnya, KPK telah menetapkan tiga penyelenggara negara sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan pin-

jaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2021. Ketiga pejabat negara itu diduga telah melakukan kongkalikong jahat terkait pengajuan dana PEN.

Adapun, ketiga tersangka tersebut yakni, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), M Ardian Noervianto (MAN); mantan Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur (AMN) serta Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Muna, Laode M Syukur Akbar (LMSA).

Dalam perkara ini, Ardian dan Laode Syukur Akbar diduga telah menerima suap terkait pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk Kabupaten Kolaka Timur tahun 2021. Keduanya menerima suap sejumlah Rp2 miliar dari Bupati Kolaka Timur, Andi Merya Nur. Ardian diduga mendapat jatah sekitar 131.000 dolar Singapura atau setara dengan Rp1,5 miliar dari total uang suap Rp2 miliar. Sedangkan Syukur Akbar kecaprangan uang suap Rp500 juta. Uang suap sebesar Rp2 miliar itu disetorkan Andi Merya Nur ke rekening Syukur Akbar. ● han



IDN/ANTARA

SIDANG PEMBACAAN TUNTUTAN TIPIKOR BUPATI NONAKTIF BANJARNEGARA

Terdakwa kaksus korupsi yang dihadirkan secara “online” dan ditampilkan pada layar bagian kiri yaitu Bupati nonaktif Banjarnegara Budhi Sarwono (kanan) dan Kedy Afandi (kiri) saat mendengarkan pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam sidang kasus korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi, di Pengadilan Tipikor, Semarang, Jawa Tengah, Jumat (20/5). Dalam sidang tersebut tim jaksa KPK menuntut Budhi Sarwono dengan hukuman 12 tahun penjara dan denda Rp700 juta subsidier 6 bulan kurungan serta mengganti kerugian negara sebesar Rp26,028 miliar, dan Kedy Afandi dengan hukuman 11 tahun penjara, denda Rp700 juta subsidier 6 bulan kurungan.

PENGUMUMAN
Bahwa PT. BAHTERA LAJU SENTOSA, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan), dengan ini mengumumkan bahwa akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perihal Pembubaran Perseroan. Dengan ini dimumkan kepada semua pihak yang berkepentingan dengan Perseroan tersebut dapat menghadiri atau mengajangi kehadiran secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pengumuman ini kepada Direksi Perseroan dengan alamat:
PT. BAHTERA LAJU SENTOSA
Ruko Lodan Center Blok B Nomor 3,
Jalan Lodan No. 02, Kel. Ancol,
Kec. Pademangan, Jakarta Utara

Pengumuman ini dibuat dalam rangka pemenuhan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 147 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Jakarta, 21 Mei 2022
Tel.
Direksi PT. BAHTERA LAJU SENTOSA.